

中国共产党第二十次全国代表大会 新闻中心

Press Center for the 20th National Congress of the Communist Party of China



KONFERENSI PERS KONGRES CPC KE-20

Pusat pers untuk Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok (CPC) ke-20 menyelenggarakan konferensi pers dengan topik “Di Bawah Bimbingan Pemikiran Xi Jinping tentang Diplomasi, Maju dan Berusaha Mendobrak Jalan Baru untuk Diplomasi Negara Besar dengan Tiongkok Karakteristik” di Beijing, Tiongkok, Kamis (20/10). Shen Beili, Wakil Menteri Departemen Internasional Komite Sentral CPC dan Ma Zhaoxu, Wakil Menteri Kementerian Luar Negeri, menghadiri konferensi pers.

Krisis Kian Parah, 2,2 Juta Balita di Yaman Menderita Kelaparan

Sekitar 2,2 juta anak Yaman di bawah usia 5 tahun diketahui menderita kelaparan dan lebih dari setengah juta orang mengalami kekurangan gizi parah.

YAMAN (IM) - Kelaparan telah bertahun-tahun menengsarakan kehidupan ratusan ribu anak di Yaman. Kini, perang antara kelompok pemberontak Houthis yang didukung Iran dan koalisi pimpinan Arab Saudi, yang diperkirakan akan meningkat setelah berbulan-bulan gencatan senjata akan lemah, dikhawatirkan akan memperparah situasi itu.

Joyce Msuya, Asisten Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan kemanusiaan, mengatakan di kota Hodeida, dengan populasi sekitar 3 juta, Rumah Sakit (RS) al-Thawra

menerima 2.500 pasien setiap harinya, termasuk anak-anak yang mengalami kekurangan gizi parah. Hal ini dungkapkannya saat dia mengunjungi fasilitas itu bulan ini.

Sekitar 2,2 juta anak Yaman di bawah usia 5 tahun diketahui menderita kelaparan. Lebih dari setengah juta orang mengalami kekurangan gizi parah.

PBB mengatakan sekitar 1,3 juta wanita hamil atau menyusui mengalami kekurangan gizi parah tahun ini.

“Ini adalah salah satu kunjungan paling menyedihkan yang pernah saya lakukan dalam kehidupan profesional

saya,” kata Msuya dalam video yang dirilis PBB, dikutip VOA.

“Ada kebutuhan yang sangat besar. Setengah dari rumah sakit Yaman tidak berfungsi, atau mereka benar-benar hancur oleh perang. Kami membutuhkan lebih banyak dukungan untuk menyelamatkan nyawa anak-anak, wanita dan pria di Yaman,” lanjutnya.

Perang di Ukraina memperburuk situasi. Makanan orang Yaman sangat bergantung pada gandum. Ukraina memasok sekitar 40% kebutuhan biji-bijian Yaman, sampai invasi Rusia memotong aliran itu. Harga makanan di Yaman kini 60% lebih tinggi daripada harga tahun lalu, dan bagi banyak orang di negara tersebut ketidakmampuan membeli pangan bisa berarti kematian.

“Yaman telah mengalami tiga kali pukulan akibat invasi Rusia ke Ukraina,” kata Peter Salisbury, pakar Yaman di International Crisis Group.

“Pertama, dengan hilangnya pasokan makanan dari Ukraina dan harga yang lebih tinggi di pasar internasional. Kemudian, dengan harga bahan bakar yang lebih tinggi. Dan ketiga, dengan pergeseran fokus internasional,” lanjutnya.

Perang telah berkecamuk selama delapan tahun di Yaman antara pemberontak Syiah Houthis dan pasukan pro-pemerintah yang didukung oleh koalisi negara-negara Teluk Arab yang mayoritas penduduknya Sunni.

Pada 2014, Houthis yang didukung Iran menduduki Yaman Utara dan ibu kota negara itu, Sanaa, dan memaksa pemerintah yang diakui secara internasional melarikan diri ke Arab Saudi. Sejak itu, lebih dari 150.000 orang tewas akibat kekerasan dan 3 juta orang mengungsi. Dua per

tiga penduduk terpaksa harus mendapatkan bantuan pangan.

Bantuan pangan sendiri tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Badan pangan PBB telah memotong jatah pangan jutaan orang karena kekurangan dana yang kritis dan melonjaknya harga pangan global.

Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, atau OCHA, Program Pangan Dunia (WFP) selama berbulan-bulan memprioritaskan 13,5 juta orang Yaman yang paling rentan.

PBB mengatakan bahwa pada akhir September, rencana respons kemanusiaan untuk Yaman hanya memperoleh USD2 miliar (Rp31 triliun) dari USD4,27 miliar (Rp66 triliun) secara internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan layanan perlindungan yang menyelamatkan jiwa kepada 17,9 juta orang. ● tom

Rusia Ancam akan Tinjau Ulang Kerja Sama dengan Sekjen PBB

MOSKOW (IM) - Rusia mengatakan akan meninjau ulang kerja sama dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bila ia mengirimkan pakar ke Ukraina untuk menginspeksi drone-drone yang menurut negara-negara Barat merupakan produksi Iran. Bagi Barat penggunaan drone itu melanggar resolusi PBB.

Dalam rapat tertutup Dewan Keamanan PBB mengenai penggunaan drone di Ukraina, Deputi Duta Besar PBB Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy meminta Guterres dan stafnya untuk “menahan diri dari untuk terlibat dengan setiap penyelidikan ilegal”.

“Jika tidak kami akan menilai ulang kolaborasi kami dengan mereka, yang mana hampir tidak menguntungkan bagi siapa pun, kami tidak menginginkannya, tapi tidak ada pilihan lain,” katanya pada wartawan, Selasa (19/10).

Polyanskiy tidak menjelaskannya lebih lanjut. Rapat Dewan Keamanan mengenai penggunaan drone dalam perang Rusia di Ukraina merupakan permintaan Amerika Serikat (AS), Prancis dan Inggris yang berpendapat drone-drone itu produksi Iran dan penggunaannya melanggar resolusi 2015 yang mendukung kesepakatan nuklir.

Teheran membantah memasok drone ke Moskow dan Rusia membantah pasukannya menggunakan drone Iran dalam serangan ke Iran.

“Iran memiliki kewajiban untuk tidak mengekspor senjata-senjata ini, sebagai anggota PBB, Iran memiliki tanggung jawab untuk tidak mendukung agresi perang Rusia,” kata Deputi Duta Besar

Inggris untuk PBB James Kariuki.

Pada pekan ini Ukraina mengundang pakar-pakar PBB untuk menginspeksi beberapa drone yang berhasil dijatuhkan. Guterres melaporkan implementasi resolusi 2015 ke Dewan Keamanan PBB dua kali setahun, biasanya bulan Juni dan Desember. Semua asesmen pada drone-drone yang ditembak jatuh di Ukraina tampaknya akan masuk ke laporan itu. “Sebagai kebijakan, kami selalu siap untuk menyelidiki setiap informasi dan menganalisis setiap informasi yang dibawa oleh negara anggota,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.

Iran dan Rusia berpendapat tidak ada mandat yang mengharuskan Guterres mengirimkan pakar ke Ukraina untuk menginspeksi drone-drone itu. Dalam suratnya ke Guterres pada Rabu kemarin, Duta Besar Iran untuk PBB Amir Saied Iravani mengatakan dasar hukum undang Ukraina pada pakar PBB “lemah.”

Ia meminta Guterres “untuk mencegah setiap penyalahgunaan” resolusi dan isu pejabat PBB yang berkaitan pada perang Ukraina. Sementara itu Duta Besar Prancis untuk PBB Nicolas de Riviere mengatakan Guterres memiliki mandat untuk melakukan asesmen teknis. “(Guterres) memiliki mandat yang jelas untuk memberikan laporan dua kali setahun pada semua hal ini dan untuk melakukan asesmen teknis, sehingga saya kira sekretariat PBB akan jalan dan akan pergi,” katanya.

Berdasarkan resolusi 2015 embargo senjata konvensional pada Iran berlaku sampai Oktober 2020. Tapi Ukraina dan negara-negara Barat berpendapat resolusi itu masih termasuk pembatasan pada rudal dan teknologi yang berkaitan dengannya sampai Oktober 2023 dan dapat mencakup ekspor dan pembelian senjata militer canggih seperti drone.

Dewan Keamanan PBB tidak dapat mengambil tindakan substansial dalam perang di Ukraina. Sebab Rusia memiliki hak veto di lembaga 15 negara anggota itu, bersama Tiongkok, AS, Prancis, dan Inggris. Dujarric menolak mengomentari pernyataan Polyanskiy. ● gul

4 Negara Ini Terancam Tenggelam Akibat Pemanasan Global

JAKARTA (IM) - Pemanasan global yang terus terjadi menyebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah naiknya permukaan air laut. Bagi negara-negara kepulauan yang kecil, pemanasan global tentunya menjadi ketakutan tersendiri karena bisa membuat sebuah negara tenggelam. Negara apa sajakah yang terancam tenggelam akibat pemanasan global? Berikut informasinya dilansir dari berbagai sumber.

1. Kiribati

Salah satu negara yang terancam tenggelam lantaran pemanasan global adalah Kiribati. Negara kepulauan yang berada di Samudera Pasifik ini memiliki titik tertinggi hanya 2 meter di atas permukaan laut. Hal inilah yang membuat Kiribati sangat terancam hilang beringin dengan naiknya air laut akibat pemanasan global. Melansir Sindonews, Kiribati adalah negara pertama yang seluruh warganya akan direlokasi jika suatu saat negaranya hilang.

Kiribati tercatat dihuni oleh 121.388 jiwa per tahun 2021. Jumlah ini terus meningkat sejak merdeka dari Inggris di tahun 1979. Kala itu, penduduknya hanya berjumlah 58.469 orang. Lahan yang dimiliki Kiribati sangat terbatas untuk pertanian. Akibatnya, masyarakat sangat bergantung pada produk impor dan makanan cepat saji. Masyarakat Kiribati kini dihadapkan pada kekhawatiran baru, yakni pohon kelapa yang mereka tanam tidak produktif lagi.

Hal itu terjadi karena adanya perubahan cuaca ekstrem, sehingga pohon-pohon justru mengering.

2. Nauru

Nauru merupakan negara pulau terkecil dan masuk dalam tiga negara paling kecil di dunia, dengan luas hanya 8 mil persegi. Negara ini memiliki populasi 10.980 per Oktober 2022. Ketika terjadi perubahan iklim akibat pemanasan global, Nauru akan tenggelam sangat cepat dan hilang.

Melansir laman Newsweek, perusahaan Jerman mulai melakukan penambangan di Nauru pada tahun 1900-an. Penambangan itu bertujuan untuk memperoleh fosfat yang sangat berguna bagi lini pertanian. Ketika masa Perang Dunia II, Jepang berhasil menduduki Nauru dan melanjutkan penambangan. Pada tahun 1943, Amerika Serikat (AS) meledakkan landasan udara Joang di Nauru dan menghalau masuknya pasokan makanan ke negara kecil itu. Usai Perang Dunia II tamat, Nauru diambil alih Australia dan penambangan fosfatnya dilanjutkan negara tersebut.

3. Tuvalu

Negara selanjutnya yang juga terancam tenggelam adalah Tuvalu. Dulunya, Tuvalu dikenal dengan Kepulauan Ellice, yang berada di tengah-tengah antara Hawaii dan Australia. Merupakan negara kepulauan yang kecil, jarak antara pantai dengan air laut Tuvalu sangatlah dekat. Apabila air laut naik dan ombak besar terjadi, tentunya akan menenggelamkan negara ini. Sebagian besar masyarakat Tuvalu sedang takut apabila air laut sedang mengalami pasang. Diketahui, titik tertinggi Tuvalu hanya 4,5 meter di atas permukaan laut. Hal tersebut berarti negara ini bisa saja hilang akibat tenggelam.

4. Maladewa

Maladewa, sebuah negara kepulauan di barat daya India, terkenal karena menjadi langgan destinasi wisata turis asing, terutama mereka yang ingin berbulan madu. Sayangnya, negara ini terancam tenggelam akibat dampak perubahan iklim. Pemerintah Maladewa dikabarkan kesulitan mendapat dana untuk membangun infrastruktur utama, seperti dinding laut. Dinding laut ini bertujuan agar pulau-pulau di negara tersebut bisa terlindungi dari naiknya permukaan air laut akibat pemanasan global. Setidaknya ada 80% wilayah Maladewa yang tingginya kurang dari 1 meter di atas permukaan air laut. Hal itu menjadikan 530 ribu penduduknya rentan mengalami gelombang badai, cuaca buruk, dan air pasang. ● ans

berada di tengah-tengah antara Hawaii dan Australia. Merupakan negara kepulauan yang kecil, jarak antara pantai dengan air laut Tuvalu sangatlah dekat. Apabila air laut naik dan ombak besar terjadi, tentunya akan menenggelamkan negara ini. Sebagian besar masyarakat Tuvalu sedang takut apabila air laut sedang mengalami pasang. Diketahui, titik tertinggi Tuvalu hanya 4,5 meter di atas permukaan laut. Hal tersebut berarti negara ini bisa saja hilang akibat tenggelam.

4. Maladewa

Maladewa, sebuah negara kepulauan di barat daya India, terkenal karena menjadi langgan destinasi wisata turis asing, terutama mereka yang ingin berbulan madu. Sayangnya, negara ini terancam tenggelam akibat dampak perubahan iklim. Pemerintah Maladewa dikabarkan kesulitan mendapat dana untuk membangun infrastruktur utama, seperti dinding laut. Dinding laut ini bertujuan agar pulau-pulau di negara tersebut bisa terlindungi dari naiknya permukaan air laut akibat pemanasan global. Setidaknya ada 80% wilayah Maladewa yang tingginya kurang dari 1 meter di atas permukaan air laut. Hal itu menjadikan 530 ribu penduduknya rentan mengalami gelombang badai, cuaca buruk, dan air pasang. ● ans

berada di tengah-tengah antara Hawaii dan Australia. Merupakan negara kepulauan yang kecil, jarak antara pantai dengan air laut Tuvalu sangatlah dekat. Apabila air laut naik dan ombak besar terjadi, tentunya akan menenggelamkan negara ini. Sebagian besar masyarakat Tuvalu sedang takut apabila air laut sedang mengalami pasang. Diketahui, titik tertinggi Tuvalu hanya 4,5 meter di atas permukaan laut. Hal tersebut berarti negara ini bisa saja hilang akibat tenggelam.

Jaksa Dakwa Lima Warga Rusia Karena Beli Teknologi dari AS

WASHINGTON (IM) - Jaksa Amerika Serikat (AS) mendakwa lima warga negara Rusia karena membeli teknologi militer dari AS. Beberapa teknologi militer ini berakhir di medan perang di Ukraina.

Jaksa federal di Brooklyn menyatakan, warga negara Rusia Yury Orekhov dan Svetlana Kuzurgasheva membeli komponen elektronik, termasuk semikonduktor, radar, dan satelit. Beberapa barang elektronik yang diperoleh melalui skema tersebut telah ditemukan di platform senjata Rusia yang disita di Ukraina.

Jaksa mengatakan, mereka menggunakan perusahaan Jerman dan perusahaan minyak Venezuela untuk mengirimkan teknologi militer ke pembeli Rusia. Orekhov ditangkap di Jerman pada Senin (17/10) lalu. Sementara terdakwa Rusia lainnya dalam kasus ini yaitu Artem Uss, telah ditangkap di Italia. Amerika Serikat sedang mengupayakan ekstradisi terhadap terdakwa.

“Kami akan terus menyelidiki, dan menuntut mereka karena menghindari sanksi dan pencucian uang transnasional,” kata jaksa federal di Brooklyn, Breon Peace.

Pada hari yang sama, Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada Orekhov dan dua perusahaan yang dia kendalikan, yaitu Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), dan Opus Energy Trading LLC. Departemen Keuangan menggambarkan Orekhov sebagai agen pengadaan.

Departemen Keuangan menyatakan, beberapa pengiriman militer dan teknologi penggunaan ganda yang sensitif kepada pengguna Rusia, telah melanggar kontrol ekspor AS. Teknologi as itu dapat digunakan dalam pesawat tempur, sistem rudal balistik dan hipersonik, amunisi pintar, dan aplikasi militer lainnya.

Dalam pertemuan pertama dengan pejabat dari 32 negara dan Amerika Serikat, Washington memperingatkan, pihaknya dapat menjatuhkan sanksi kepada orang, negara, dan perusahaan yang mem-

berikan amunisi ke Rusia atau mendukung kompleks industri militernya.

“Kami tahu upaya ini memiliki efek langsung di medan perang, karena keputusan Rusia telah membuat mereka beralih ke pemasok yang lebih rendah dan peralatan yang ketinggalan zaman,” kata Wakil Menteri Keuangan AS, Wally Adeyemo dalam sebuah pernyataan.

Jaksa menyatakan, Orekhov dan Uss memiliki NDA dan menggunakannya sebagai kedok untuk membeli teknologinya AS dan mengirimkannya ke pengguna akhir di Rusia.

Dua warga Rusia lainnya yaitu Timofey Telegin dan Sergey Tulyakov, juga didakwa dengan dakwaan serupa pada Rabu.

Jaksa mengatakan, para terdakwa menggunakan perusahaan palsu dan menyerahkan informasi palsu ke bank-bank AS. Terdakwa juga menggunakan cryptocurrency untuk transaksi dan mencucinya.

Orekhov dan Uss juga menggunakan NDA untuk mengirimkan jutaan barel minyak dari Venezuela ke pembeli di Rusia dan Cina. Mereka bekerja sama dengan dua terdakwa lainnya, Juan Fernando Serrano dan Juan Carlos Soto, untuk menengahi kesepakatan dengan perusahaan minyak negara Venezuela, PDVSA (NDA), dan Opus Energy Trading LLC. Departemen Keuangan menggambarkan Orekhov sebagai agen pengadaan.

Departemen Keuangan menyatakan, beberapa pengiriman militer dan teknologi penggunaan ganda yang sensitif kepada pengguna Rusia, telah melanggar kontrol ekspor AS. Teknologi as itu dapat digunakan dalam pesawat tempur, sistem rudal balistik dan hipersonik, amunisi pintar, dan aplikasi militer lainnya.

Dalam pertemuan pertama dengan pejabat dari 32 negara dan Amerika Serikat, Washington memperingatkan, pihaknya dapat menjatuhkan sanksi kepada orang, negara, dan perusahaan yang mem-

berikan sanksi kepada anak perusahaan Rosneft atas transaksi mereka dengan PDVSA, puluhan perusahaan tanpa rekam jejak perdagangan minyak telah menjadi perantara dalam penjualan minyak Venezuela ke pembeli Tiongkok. Investigasi Reuters menemukan, banyak dari mereka terdaftar sebagai halaman web di Rusia. ● gul

Presiden Kazakhstan Masuk Daftar Target Pembunuhan Ukraina

KIEV (IM) - Situs kontroversial Ukraina Mirotvorts, yang bertindak sebagai basis data musuh Kiev, memasukkan presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev dalam daftar terburunya.

Dia ditambahkan ke daftar karena secara terbuka menolak untuk mengukui agresi Rusia terhadap Ukraina dan menyangkal serangan Rusia ke Ukraina pada 2014 serta merebut wilayahnya.

Sebagai bukti pelanggaran, situs web itu mengutip wawancara Tokayev dengan media Jerman Deutsche Welle pada 2019, di mana dia mengatakan dia tidak menganggap Crimea bergabung dengan Rusia pada 2014 sebagai aneksasi.

“Kami tidak menyebut apa yang terjadi di Crimea... aneksasi. Apa yang terjadi, terjadi. Aneksasi adalah kata yang terlalu kuat untuk diterapkan di Crimea,” kata Tokayev kala itu seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (20/10).

Ia menambahkan bahwa Kazakhstan memiliki hubungan bertetangga yang benar-benar saling percaya dan baik dengan Rusia serta percaya pada kebijaksanaan dan kesopanan kepemimpinan Rusia.

Situs Mirotvorts, yang diterjemahkan sebagai ‘pembawa perdamaian’, diluncurkan pada 2014 dan dikenal luas terkait dengan layanan keamanan Ukraina.

Situs ini memosisikan dirinya sebagai database independen yang dijalankan oleh moderator anonim untuk memilih siapa yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Ukraina.

Situs web ini menyediakan informasi pribadi, seperti nama, tanggal lahir, alamat rumah, foto, dan halaman media sosial dari orang-orang yang dianggap sebagai ancaman bagi Ukraina. Mirotvorts mengklaim hanya membantu lembaga penegak hukum dan “layanan khusus” antara lain menangkap proteroris Rusia, separatist dan penjahat perang.

Bagaimanapun, beberapa menyebut database itu sebagai ‘daftar pembunuhan’ yang didukung oleh pemerintah Ukraina, setelah beberapa orang, termasuk penulis dan sejarawan Oles Buzina, politisi Oleg Kalashnikov, dan jurnalis Rusia Darya Dugina dibunuh tak lama setelah profil mereka muncul di situs itu.

Mirotvorts juga dikecam oleh pejabat Uni Eropa dan kelompok jurnalis karena membocorkan data pribadi lebih dari 4.000 anggota media. Baru-baru ini, situs tersebut secara singkat menambahkan miliarder AS Elon Musk atas ancamannya untuk memotong dana layanan internet Starlink Satellite, dan salah satu pendiri Pink Floyd Roger Waters, yang secara terbuka mengkritik pemerintah Kiev dan menentang campur tangan militer Barat di wilayah tersebut.

Daftar tersebut juga memuat informasi tentang 327 anak, termasuk Faina Savenkova, gadis 13 tahun dari Republik Rakyat Lugansk, yang meminta PBB untuk menghentikan pertemuan di wilayahnya, yang telah berlangsung sejak 2014. ● ans

Rusia guna meningkatkan upaya perang di Ukraina. Langkah itu hampir delapan bulan memasuki perang. Upaya terbaru ini menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan besar di tangan pasukan Ukraina sejak awal September.

Pengumuman Putin ini pun datang pada hari yang sama ketika Gubernur Kherson yang diangkat Rusia Vladimir Saldo mengatakan kepada warga sipil untuk meninggalkan beberapa daerah sesegera mungkin. Evakuasi ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan Ukraina yang akan segera terjadi.

Saldo menyatakan, situasi di Kherson semakin tegang. Sekitar 10 ribu orang per hari akan dipindahkan selama enam hari ke depan ke beberapa daerah di Rusia telah bersiap untuk menerima pengungsi dari wilayah Kherson.

“Lebih dari 5.000 orang telah meninggalkan Kherson dalam dua hari terakhir,” kata Saldo kepada televisi pemerintah. ● gul



PERTEMUAN DEWAN KEAMANAN DI MARKAS BESAR PBB

Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sekaligus Kepala Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah (RAT) Valentine Rugwabiza (depan) berbicara pada pertemuan Dewan Keamanan di Markas Besar PBB di New York City pada 19 Oktober 2022. Utusan tertinggi PBB untuk RAT tersebut pada Rabu (19/10) menyampaikan bahwa ada harapan perdamaian yang nyata di negara itu.

PENGUMUMAN PT. TIGA KAWAN SENTOSA (dalam likuidasi)

Dengan ini PT. TIGA KAWAN SENTOSA, berkedudukan di Kota Surabaya (dalam likuidasi), mengumumkan Pemegang Saham menyetujui rencana pembagian sisa kekayaan hasil likuidasi berdasarkan rencana akhir perseroan (dalam likuidasi) Per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 99.395.000,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dibagikan sesuai persentasenya kepada para pemegang saham perseroan (dalam likuidasi). Demikian hal ini diumumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 40 th. 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Surabaya, 21 Oktober 2022
UKUDATOR
PT. TIGA KAWAN SENTOSA
Jl. Pradhi Jaya No. 1, Pradhi/Kendal, Dukuhpesik, Kota Surabaya